

STUDI KOMPARATIF POTENSI UNGGULAN HUTAN RAKYAT UNTUK PRIORITAS PENGEMBANGAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

Comparative Study of Superior Potential of Community Forest for Priority Development in Central Java Province

Suhartono ✉

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Agroforestry
Jl.Raya Ciamis-Banjar Km. 04 PO BOX 5 Ciamis 46201

Email:om_hartono@yahoo.com

ABSTRACT

Deforestation rates of forest areas due to over functions of the area are one of the causes of declining production of natural forest timber. The Government of Indonesia via Ministry of Environment and Forestry made the solution to meet the needs of timber with the development of centers of wood production from private forests. This study aims to identify potential areas of community forests that have comparative advantages for development priorities in Central Java. The data used is the growth of private forest area in Central Java Province during 2011-2015. Data analysis using Location Quotient (LQ) and Specialization Quotient (SQ) method. The result of the research showed that the community forest sector in Central Java is not a specialized sector. There are 18 regencies/cities as potential forest area are Purbalingga District, Kendal District, Salatiga City, Purworejo District, Banjarnegara District, Sukoharjo District, Cilacap District, Sragen District, Pekalongan District, Wonogiri District, Temanggung District, Magelang District, Wonosobo District, Karanganyar District, Boyolali District, Batang District, Banyumas District and Pati District with total area of 456,575.85 Ha which can be a priority in developing community forest in Central Java.

Keywords: *people forest, development priorities, comparative study*

ABSTRAK

Laju deforestasi kawasan hutan akibat alih fungsi kawasan menjadi salah satu sebab penurunan produksi kayu dari kawasan hutan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah berusaha membuat solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu dengan pengembangan sentra-sentra produksi kayu dari hutan rakyat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi daerah basis potensial hutan rakyat yang memiliki keunggulan komparatif untuk prioritas pengembangan di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah time series perkembangan luas hutan rakyat Provinsi Jawa Tengah selama 2011-2015. Analisis data dilakukan dengan pendekatan metode Location Quotient (LQ) dan Kuosien Spesialisasi (KS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor hutan rakyat di Jawa Tengah bukan merupakan usaha yang terspesialisasi. Terdapat 18 kabupaten/kota sebagai daerah basis hutan rakyat potensial, yakni : Kabupaten Purbalingga, Kendal, Kota Salatiga, Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Cilacap, Sragen, Pekalongan, Wonogiri, Temanggung, Magelang, Wonosobo, Karanganyar, Boyolali, Batang, Banyumas dan Pati dengan total luas 456.575,85 Ha yang dapat dijadikan prioritas unggulan pengembangan hutan rakyat di Jawa Tengah.

Kata kunci: *hutan rakyat, prioritas pengembangan, studi komperatif*

PENDAHULUAN

Hutan rakyat didefinisikan sebagai hutan yang memiliki penutupan tajuk tanaman berkayu maupun jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman minimal 500 batang per ha dengan luas minimal 0,25 Ha yang berada di luar kawasan hutan negara (Depertemen Kehutanan, 1997). Hutan rakyat merupakan salah satu potensi sumberdaya alam yang memegang peranan penting dalam pembangunan sekoral di suatu daerah dan dinilai menjadi solusi untuk mengatasi masalah hutan dan kehutanan (Rahmat, 2011; Waluyo *et al.*, 2010). Bahkan pemerintah telah menjadikan hutan rakyat sebagai solusi untuk mencukupi keutuhan bahan baku industri pemanfaatan hasil hutan kayu yang selama ini berasal dari kawasan hutan negara.

Selain memproduksi kayu, hutan rakyat juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu (Diniyati & Achmad, 2015). Di Provinsi Jawa Tengah, sektor kehutanan menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data BPS Jawa Tengah (2018), perkembangan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir secara umum mengalami peningkatan.

Hal ini didukung dengan pertumbuhan jumlah industri pemanfaatan hasil hutan kayu yang semakin berkembang. Hingga saat ini di Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki 81 unit industri yang berbahan baku kayu berkapasitas lebih dari 6.000 m³ (Kementerian LHK, 2017). Jumlah tersebut

belum termasuk IPHHK yang memiliki kapasitas kurang dari 6.000 m³ per tahun dan industri kayu rakyat yang belum memiliki izin.

Tabel 1. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Tahun	PDRB (jutaan rupiah)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	2013	4.936.439,80	
2	2014	5.282.203,81	7,00
3	2015	5.653.154,17	7,02
4	2016	5.516.303,29	-2,42
5	2017	5.591.369,96	1,36

Sumber: BPS Jawa Tengah (2018)

Peningkatan produksi kayu khususnya kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir (2015-2016). Pada tahun 2015 tercatat produksi kayu bulat di Jawa Tengah sebesar 2,1 juta m³ dan meningkat menjadi 2,6 juta m³ di tahun 2016 (Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2018). Agar trend positif perkembangan hutan rakyat tetap terjaga diperlukan dukungan para pihak terutama pemerintah daerah melalui instrument kebijakan. Sebagai langkah awal diperlukan rencana prioritas pengembangan kawasan-kawasan yang memiliki keunggulan komparatif dalam hal potensi hutan rakyat.

Berbagai kajian tentang hutan rakyat di Jawa Tengah sudah banyak dilakukan baik karakteristik hutan rakyat (Jariyah & Wahyuningrum, 2008), persepsi petani terhadap hutan rakyat (Hudiyani, 2017), model pengelolaan (Yumi *et al.* 2011), hama dan penyakit tanaman (Ismail & Anggraeni, 2008), dinamika etat tebang dan cadangan karbon hutan rakyat (Lusitania & Purwanto, 2016), dan manfaat ekonomi hutan rakyat (Irawanti *et al.*, 2012).

Hasil penelitian Jariyah & Wahyuningrum (2008) menyimpulkan bahwa bahwa karakteristik jenis tanaman hutan rakyat di setiap daerah di Pulau Jawa berbeda-beda karena dipengaruhi faktor biofisik. Namun secara umum jenis-jenis tanaman yang disukai petani di Jawa antara lain jati, mahoni, suren, akasia, pinus, albasia dan sonokeling. Hudiyani (2017) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa persepsi petani terhadap pengelolaan dan manfaat hutan rakyat masih tinggi terutama pada hutan rakyat pola agroforestry. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Yumi *et al.* (2011) menyebutkan bahwa kelembagaan pendukung pembelajaran dan kelembagaan internal masyarakat memiliki peran penting dalam pembelajaran petani hutan rakyat.

Ismail & Anggraeni (2008) dalam hasil penelitian menyatakan bahwa diantara jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang tanaman hutan rakyat jati antara lain bakteri *Pseudomonas tectonae* (*Ralstonia solanacearum*) sementara tanaman akasia diserang oleh jamur *Meliola* sp., *Atelocauda digitata* dan *Oidium* sp. Dari perspektif ekonomi Irawanti *et al.* (2012) menjelaskan bahwa pengelolaan hutan rakyat khususnya jenis sengon sebaiknya dilakukan dengan sistem penanaman campuran karena dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi kepada pendapatan petani baik manfaat jangka pendek (hasil bukan kayu) maupun manfaat jangka panjang (hasil kayu). Hasil penelitian Lusitania & Purwanto (2016) menemukan bahwa hutan rakyat perlu disertifikasi karena sertifikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari memiliki dampak positif dalam meningkatkan etas tebangtan maupun simpanan karbon pada hutan rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi daerah yang menjadi basis untuk prioritas pengembangan hutan rakyat di Jawa Tengah. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sektor usaha hutan rakyat menjadi usaha yang terspesialisasi atau tidak di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode *desk study* dimana penggunaan data sekunder lebih dominan. Data sekunder yang digunakan adalah data perkembangan hutan rakyat kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 5 tahun terakhir (2011-2015) yang dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk menentukan daerah kabupaten/kota yang akan menjadi prioritas pengembangan hutan rakyat digunakan pendekatan analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis Kuosien Spesialisasi (KS) (Hendayana, 2003; Afnan *et al.*, 2016).

Penggunaan analisis LQ bertujuan untuk mengetahui apakah usaha hutan rakyat di suatu daerah merupakan sektor basis atau non basis. Sebuah sektor usaha hutan rakyat dikatakan sebagai basis pada suatu wilayah apabila sektor usaha tersebut relatif lebih unggul dibanding dengan wilayah yang lebih luas. Dan disebut non basis apabila sektor usaha hutan rakyat tersebut tidak memiliki keunggulan relatif. Sebagai dasar perhitungan dalam metode LQ adalah perbandingan luas hutan rakyat setiap kabupaten/kota dengan luas hutan rakyat total wilayah Provinsi Jawa Tengah.

$$LQ_i = \frac{k_i/k_t}{K_i/K_t}$$

Dimana k_i adalah luas hutan rakyat kabupaten i ; k_t adalah luas wilayah kabupaten i ; K_i adalah luas hutan rakyat Provinsi Jawa Tengah; dan K_t adalah luas wilayah Provinsi Jawa Tengah

Interpretasi nilai LQ adalah sebagai berikut:

LQ<1 : hutan rakyat di Kabupaten i bukan sebagai basis

LQ=1 : hutan rakyat di Kabupaten i merupakan basis produksi hutan rakyat

LQ>1 : hutan rakyat di Kabupaten i merupakan basis produksi hutan rakyat

Untuk mengetahui apakah jenis usaha hutan rakyat merupakan sektor yang diusahakan secara khusus di Jawa Tengah digunakan pendekatan analisis Kuosien Spesialisasi (KS).

$$KS_i = \frac{k_i}{k_t} - \frac{K_i}{K_t}$$

Angka $KS \geq 1$ atau $KS \sim 1$ menunjukkan bahwa hutan rakyat merupakan sektor yang terspesialisasi dan angka $KS \sim 0$, menunjukkan bahwa hutan rakyat bukan sektor yang terspesialisasi di Jawa Tengah. Apabila nilai KS lebih dari angka 1 atau mendekati angka 1 berarti sektor hutan rakyat menjadi sektor usaha yang dilaksanakan secara khusus atau terspesialisasi di wilayah tersebut. Dan sebaliknya sektor hutan rakyat bukan merupakan usaha terspesialisasi pada suatu wilayah apabila nilai KS mendekati angka nol.

Selanjutnya pemilihan daerah yang akan menjadi prioritas pengembangan hutan rakyat ditentukan berdasarkan pertimbangan nilai LQ dan KS. Wilayah dengan potensi hutan rakyat yang memiliki nilai $LQ \geq 1$ dan atau $KS \geq 1$ atau $KS \sim 1$ dapat dipertimbangkan menjadi daerah prioritas untuk pengembangan hutan rakyat di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Potensi Hutan Rakyat di Jawa Tengah

Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta Ha atau 25,04% (cek ulang dengan data yang tepat) dari luas total Pulau Jawa (BPS Jawa Tengah, 2018). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, potensi luasan hutan rakyat di wilayah ini mencapai 640.394 Ha yang tersebar di 35 daerah kabupaten/kota. Kabupaten Cilacap merupakan daerah kabupaten yang memiliki potensi hutan rakyat terbesar yaitu 57.470 Ha atau 8,97% luas hutan rakyat di Jawa Tengah. Sedangkan daerah dengan potensi hutan rakyat terkecil adalah Kota Tegal dengan luas hutan rakyat 16,28 Ha atau 0,003% total luas hutan rakyat Jawa Tengah.

Besarnya luasan hutan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah merupakan potensi bagi perkembangan ekonomi daerah. Hal ini didukung oleh banyaknya industri yang menggunakan kayu sebagai bahan baku. Data Statistik Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa sampai tahun 2016 terdapat 81 unit Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

(IPHHK) berkapasitas >6000 m³ di Jawa Tengah dengan realisasi pemenuhan dan baku kayu dari hutan rakyat sebesar 1.807.247 m³. Data tersebut belum termasuk IPHHK yang berkapasitas <6.000 m³ yang jumlahnya lebih banyak serta jumlah industri pengolahan kayu rakyat (≤ 2.000 m³) yang belum terinventarisir.

Tabel 2. Potensi Hutan Rakyat Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sampai Dengan Tahun 2015

No.	Kabupaten/kota	Luas wilayah (ha)	Luas hutan rakyat (Ha)	% dari total hutan rakyat
1	Cilacap	213.851	57.470,00	8,97
2	Banyumas	132.759	25.266,00	3,95
3	Purbalingga	77.765	30.535,58	4,77
4	Banjarnegara	106.974	32.440,11	5,07
5	Kebumen	128.274	18.249,63	2,85
6	Purworejo	103.482	40.415,00	6,31
7	Wonosobo	98.468	20.614,16	3,22
8	Magelang	108.573	25.234,70	3,94
9	Boyolali	101.507	20.107,97	3,14
10	Klaten	65.556	12.497,00	1,95
11	Sukoharjo	46.666	7.984,00	1,25
12	Wonogiri	182.237	40.428,00	6,31
13	Karanganyar	77.220	16.687,21	2,61
14	Sragen	94.649	21.974,99	3,43
15	Grobogan	197.585	19.795,14	3,09
16	Blora	179.440	18.302,31	2,86
17	Rembang	101.410	14.225,65	2,22
18	Pati	149.120	34.683,00	5,42
19	Kudus	42.517	5.469,63	0,85
20	Jepara	100.416	17.945,53	2,80
21	Demak	89.743	5.394,00	0,84
22	Kab. Semarang	94.686	15.613,10	2,44
23	Temanggung	87.023	19.885,00	3,11
24	Kendal	100.227	28.784,14	4,49
25	Batang	78.895	14.752,34	2,30
26	Kab. Pekalongan	83.613	18.385,37	2,87
27	Pemalang	101.190	18.473,21	2,88
28	Tegal	87.970	8.192,76	1,28
29	Brebes	165.773	20.820,00	3,25
30	Kota Magelang	1.812	50,00	0,01
31	Kota Surakarta	4.403	49,94	0,01
32	Kota Salatiga	5.296	928,28	0,14
33	Kota Semarang	37.367	8631,90	1,35
34	Kota Pekalongan	4.496	91,97	0,01
35	Kota Tegal	3.449	16,28	0,00
		3.254.412	640.393,90	100,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah (2018)

Potensi hutan rakyat di suatu daerah memiliki peran cukup penting bagi perkembangan perekonomian daerah. Oleh karena itu kegiatan identifikasi potensi daerah yang memiliki keunggulan komparatif merupakan langkah awal dalam perencanaan pembangunan sektoral di daerah (Rahmat, 2011). Pemetaan potensi basis hutan rakyat di Jawa Tengah sangat diperlukan untuk mengukur kemampuan produksi hutan rakyat dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu di Jawa Tengah yang tidak mungkin dipenuhi 100% dari produksi hutan Negara.

Daerah Basis Hutan Rakyat

Hasil analisis *Location Question* diketahui sebaran daerah kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif pada sektor hutan rakyat seperti pada Tabel 3.

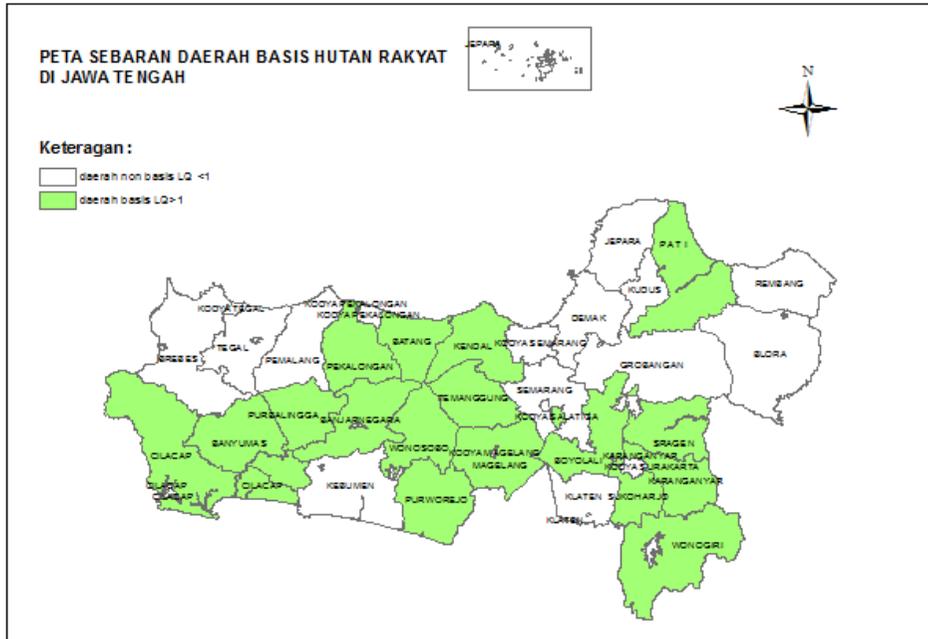
Daerah dengan potensi hutan rakyat yang luas memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri bahkan mensuplay daerah lain. Wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai daerah basis karena memiliki keunggulan komparatif. Terdapat 18 daerah kabupaten yang merupakan daerah basis hutan rakyat dengan nilai $LQ \geq 1$ dan 17 kabupaten/kota termasuk non basis karena nilai $LQ < 1$. Kabupaten Purbalingga menjadi daerah basis hutan rakyat terbesar dengan nilai $LQ = 2,10$ dan Kota Tegal sebagai kota yang memiliki sektor hutan rakyat paling kecil ($LQ = 0,02$).

Daerah basis hutan rakyat di Jawa Tengah memiliki total luas 456.575,85 Ha dan luas hutan rakyat non basis 183.818,05 Ha. Jika dilihat dari perbandingan daerah basis dan non basis menunjukkan bahwa luas daerah basis lebih besar dibanding dengan daerah non basis. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan kayu dari hutan rakyat untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah berpotensi terpenuhi dari hasil produksi hutan rakyat di wilayah sendiri.

Penentuan daerah basis unggulan hutan rakyat di Jawa Tengah merupakan tahapan awal pengembangan komoditas tersebut untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif. Menurut Hendayana (2003), pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan komparatif suatu daerah sangat penting untuk menghadapi perdagangan bebas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa untuk menjadikan suatu komoditas menjadi unggul secara komparatif dan kompetitif, dalam pengembangannya harus berpijak pada prinsip efisiensi.

Tabel 3. Rata-Rata Nilai LQ Potensi Hutan Rakyat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No.	Kabupaten/kota	Nilai LQ	Keterangan/kriteria
1	Cilacap	1,36	daerah basis
2	Banyumas	1,01	daerah basis
3	Purbalingga	2,10	daerah basis
4	Banjarnegara	1,62	daerah basis
5	Kebumen	0,66	daerah non basis
6	Purworejo	1,65	daerah basis
7	Wonosobo	1,09	daerah basis
8	Magelang (Kab)	1,10	daerah basis
9	Boyolali	1,06	daerah basis
10	Klaten	0,52	daerah non basis
11	Sukoharjo	1,41	daerah basis
12	Wonogiri	1,17	daerah basis
13	Karanganyar	1,06	daerah non basis
14	Sragen	1,24	daerah basis
15	Grobogan	0,41	daerah non basis
16	Blora	0,65	daerah non basis
17	Rembang	0,75	daerah non basis
18	Pati	1,00	daerah non basis
19	Kudus	0,53	daerah non basis
20	Jepara	0,88	daerah non basis
21	Demak	0,32	daerah non basis
22	Semarang (Kab)	0,71	daerah non basis
23	Temanggung	1,10	daerah basis
24	Kendal	1,98	daerah basis
25	Batang	1,04	daerah basis
26	Pekalongan (Kab)	1,17	daerah basis
27	Pemalang	0,98	daerah non basis
28	Tegal	0,51	daerah non basis
29	Brebes	0,60	daerah non basis
30	Kota Magelang	0,15	daerah non basis
31	Kota Surakarta	0,06	daerah non basis
32	Kota Salatiga	1,75	daerah basis
33	Kota Semarang	0,86	daerah non basis
34	Kota Pekalongan	0,14	daerah non basis
35	Kota Tegal	0,02	daerah non basis



Gambar 1.

Sebaran Daerah Basis Hutan Rakyat di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Daerah Prioritas Pengembangan

Untuk menguji apakah sektor hutan rakyat menjadi sektor yang diusahakan secara khusus atau tidak dilihat berdasarkan nilai KS sektor hutan rakyat seperti pada Tabel 4.

Daerah kabupaten/kota yang memiliki nilai LQ lebih dari atau sama dengan satu menunjukkan bahwa potensi hutan rakyat pada daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain. Selain dapat memenuhi kebutuhan untuk wilayah sendiri, daerah yang memiliki nilai $LQ > 1$ tersebut berpotensi mampu untuk mengeksport sebagian hasil hutan rakyat untuk pemenuhan kebutuhan wilayah lain.

Sektor hutan rakyat di Jawa Tengah bukan merupakan usaha yang terspesialisasi sebagaimana ditunjukkan dengan nilai KS pada seluruh wilayah kabupaten yang mendekati angka nol. Kondisi ini sangat memungkinkan mengingat pengusahaan komoditas tanaman umur panjang sejenis kayu-kayuan tidak dapat dijadikan sumber pendapatan utama yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Namun demikian usaha hutan rakyat dapat menjadi tabungan dan sumber pendapatan jangka panjang bagi petani. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Vulina dan Khairizal (2016) yang menunjukkan hal yang sama dimana komoditas tanaman tahunan seperti karet, durian, kakao dan sagu yang diusahakan di Kabupaten Indragiri Hilir bukan merupakan komoditas yang diusahakan secara spesialisasi. Namun

berbeda dengan komoditi padi dan peternakan sapi di Kabupaten Bantul yang diusahakan secara spesialisasi di daerah tersebut (Afnan et al., 2016).

Tabel 4. Daerah Kabupaten/Kota Yang Dapat Menjadi Prioritas Pengembangan Hutan Rakyat Di Jawa Tengah

No.	Kabupaten/kota	Nilai LQ	Nilai KS
1	Purbalingga	2,10	0,21
2	Kendal	1,98	0,18
3	Kota Salatiga	1,75	0,14
4	Purworejo	1,65	0,13
5	Banjarnegara	1,62	0,12
6	Sukoharjo	1,41	0,07
7	Cilacap	1,36	0,07
8	Sragen	1,24	0,04
9	Pekalongan (Kab)	1,17	0,03
10	Wonogiri	1,17	0,03
11	Temanggung	1,10	0,02
12	Magelang (Kab)	1,10	0,02
13	Wonosobo	1,09	0,02
14	Karanganyar	1,06	0,01
15	Boyolali	1,06	0,01
16	Batang	1,04	0,01
17	Banyumas	1,01	0,00
18	Pati	1,00	0,00

Walaupun tidak diusahakan secara khusus, sektor hutan rakyat di Jawa Tengah memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB sehingga perlu dikembangkan. Oleh karena itu untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas hutan rakyat diperlukan sentuhan kebijakan pemerintah. Salah satu strategi kebijakan mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan menetapkan daerah-daerah yang akan menjadi prioritas pengembangan hutan rakyat. Melalui kebijakan pengembangan daerah-daerah prioritas, diharapkan trend produksi kayu dari hutan rakyat selalu positif sehingga kebutuhan bahan baku industri di wilayah Jawa Tengah dapat dipenuhi dari produksi sendiri.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sektor hutan rakyat di Jawa Tengah bukan merupakan usaha yang terspesialisasi walaupun beberapa daerah merupakan basis hutan rakyat. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi basis hutan rakyat adalah Kabupaten Purbalingga, Kendal, Kota Salatiga, Purworejo, Banjarnegara, Sukoharjo, Cilacap, Sragen, Pekalongan, Wonogiri, Temanggung,

Magelang, Wonosobo, Karanganyar, Boyolali, Batang, Banyumas dan Pati dengan total luas 456.575,85 Ha. Wilayah-wilayah tersebut dapat dipertimbangkan menjadi prioritas dalam pengembangan hutan rakyat di Jawa Tengah karena memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lainnya dengan nilai *Location Quotient* ≥ 1 .

Saran

Hasil kajian ini bisa digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan pembangunan hutan rakyat khususnya di Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Afnan, F., Darsono, D. & Rahayu, W. 2016. Peranan Komoditi Pertanian Unggulan Tiap Kecamatan Dalam Perekonomian Wilayah Kabupaten Bantul. *Sepa Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 13(1):40-47.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*. Semarang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Departemen Kehutanan. 1997. *Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1997 Tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat*. Jakarta. Departemen Kehutanan Republik Indonesia.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah 2018. *Produksi Kayu Bulat dari Hutan Rakyat Provinsi Jawa Tengah dalam Lima Tahun Terakhir*. Semarang. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- Diniyati, D. & Achmad, B. 2015. Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Usaha Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, 9(1):23-31.
- Hendayana, R. 2003. Aplikasi Metode *Location Quotient* (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Informatika Pertanian*, 12(1):658-675.
- Hudiyani, I., Purnaningsih, N., Asngari, P. S. & Hardjanto, H. 2017. Persepsi Petani terhadap Hutan Rakyat Pola Agroforestri di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1):64-78.
- Irawanti, S., Suka, A.P. & Ekawati, S. 2012. Manfaat ekonomi dan peluang pengembangan hutan rakyat sengon di Kabupaten Pati. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3):126-139.
- Ismail, B. & Anggraeni, I. 2008. Identifikasi penyakit jati (*Tectona grandis*) dan akasia (*Acacia auriculiformis*) di hutan rakyat Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan*, 2(1):149-162.

- Jariyah, N.A. & Wahyuningrum, N. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat di Jawa. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 5(1):43-56.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017. *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*. Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lusitania, T. & Purwanto, I.R.H. 2016. *Dinamika Etat Tebangan dan Simpanan Karbon Pada Hutan Rakyat Tersertifikasi PHBML (Kasus: Hutan Rakyat Desa Alasombo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)*. Disertasi, Universitas Gadjah Mada. Tidak dipublikasikan.
- Rahmat, M. 2011. Peran Sektor Kehutanan dalam Perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(2):110-121.
- Vaulina, S. dan Khairizal. 2016. Identifikasi Komoditi Unggulan Pada Sektor Pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Agribisnis*, 18(1), 42-54.
- Waluyo, E.A., Ulya, N. A. & Martin, E. 2010. Perencanaan sosial dalam rangka pengembangan hutan rakyat di Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam*, 7(3): 271-280.
- Yumi, Y., Sumardjo, S., Gani, D.S. & Sugihen, B.G. 2011. Model Pengembangan Pembelajaran Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Kasus di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3):196-210.